

RINGKASAN

Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan dan kepastian hukum yang adil. Meski negara menjamin persamaan hak semua warga di mata hukum, faktanya akses keadilan belum bisa diakses masyarakat, khususnya kalangan tidak mampu. Bagi masyarakat tidak mampu, hambatan ekonomi dan keterbatasan pemahaman hukum sering menjadi penghalang utama dalam memperoleh layanan hukum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hadir sebagai upaya pemerintah dalam rangka persamaan hak dan keadilan hukum. Adapun maksud dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang kesulitan untuk mengakses layanan hukum serta tidak memiliki pengetahuan hukum. Dalam pelaksanaannya kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, ketidakpahaman masyarakat tentang layanan ini, minimnya sosialisasi yang dilakukan, hingga hambatan administratif yang memperlambat proses bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto kepada masyarakat tidak mampu.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi layanan pos bantuan hukum dengan fokus penelitian menggunakan model teori Ripley dan Franklin, yaitu dari sisi kepatuhan implementor kebijakan, keberlangsungan implementasi, dan dampak layanan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Sedangkan untuk validitas data menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dan menggali kebenaran informasi untuk bisa menghasilkan bukti yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama perihal tingkat kepatuhan implementor menunjukkan hasil yang baik. Pada aspek kelancaran rutinitas dan fungsi, perihal komunikasi kepada masyarakat, Pengadilan Agama Purwokerto masih kurang memberikan sosialisasi ke masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Dilihat dari dampaknya kepada masyarakat, Posbakum pengadilan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur dan hak hukum saat berperkara.

Kata Kunci: implementasi, bantuan hukum, masyarakat tidak mampu, Posbakum

SUMMARY

Indonesia as a state of law declares that everyone has the right to obtain fair legal guarantees and certainty. Although the state guarantees the equal rights of all citizens in the eyes of the law, the fact is that access to justice has not been enjoyed by the community, especially the poor. For the poor, economic barriers and limited understanding of the law are often the main obstacles in obtaining legal services. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) or Legal Aid Post is present as a government effort in the context of equal rights and legal justice. The purpose of Posbakum is to provide legal aid services for the poor who have difficulty accessing legal services and lack legal knowledge. Its implementation often faces various challenges, ranging from limited resources, public ignorance of this service, lack of socialisation, to administrative obstacles that slow down the legal aid process. Pos Bantuan Hukum is mandated by Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Bantuan Hukum and strengthened by Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Thus, this research aims to find out how the implementation of legal aid provided by the Purwokerto Religious Court to the poor.

This research aims to find out how the implementation of legal aid post services focuses on the Ripley and Franklin theoretical model, from the perspective of policy implementer compliance, implementation continuity, and service impact. The method used is descriptive qualitative research method with interactive model analysis method according to Miles, Huberman, and Saldana. Data collection was done by observation, interview, and documentation. The techniques used in selecting informants were purposive sampling and accidental sampling. As for data validity, it uses method triangulation and source triangulation, namely by comparing the information obtained and exploring the truth of the information to be able to produce different evidence.

The results of this study indicate that the implementation of the provision of legal aid through Posbakum in the Religious Court regarding the level of compliance of implementers shows good results. In the dissemination of information, the Purwokerto Religious Court is still lacking in providing dissemination to the community, especially the poor. Judging from its usefulness to the community, Posbakum court succeeded in increasing public understanding of legal procedures and rights when litigating.

Keywords: implementation, legal aid, Posbakum, the poor